Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

Sudirman[1], Susilawati[2]
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari[1,2]

ABSTRACT
The contribution of local revenue (PAD) to regional income during the 2012-2016 period on average was 37.99% per annum and for 2012 the contribution of local revenue to regional income was 37.02%. This is due to the fact that the receipt of original regional income from third party contributions is very large. On average during the period of 2012-2016 the ability of local tax is relatively low if linked to the Gross Regional Domestic Product. While the power of regional retribution if associated with Gross Regional Domestic Product is also still relatively low, but has increased from year to year. This shows that management management in receiving regional retribution has increased. On average during the 2012-2016 period the realization of local tax revenues reached 103.63% per year (very effective) from the target of local tax revenue. In addition, the realization of regional retribution revenue reaches 103.20% per year (very effective) from the target of receiving regional retribution. Whereas the realization of BUMD profit income only reached 131.01% per year (very effective) from the target of BUMD profit income and the realization of other revenue from legitimate PAD only reached 109.36% per annum (very effective). On average, the economic growth rate of Jambi Province is 5.18% per year, it is expected that the increase in local tax revenue elasticity will increase by 8.90% per year. elasticity of the increase in regional retribution receipts is 12.91% per year. The dependency ratio of Jambi Province in the period of 2012-2016 was an average of 31.69 percent per year. Jambi province's regional autonomy ratio in the 2012-2016 period is an average of 12 percent per year with instructive conditions means it is very dependent on the central government

Keywords, locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan penggunaan

anggaran sesuai dengan prinsip "*money follows function*" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip "*money follows function*" atau penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung. Menurut Lewis (2001), hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui potensi indeks daya pajak daerah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi; 2) Untuk mengetahui potensi indeks daya retribusi daerah sebagai akibat pertumbuhan ekonomi; 3) Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD yang Syah; 4) Untuk mengetahui tingkat elastisitas perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari perubahan PDRB.

METODE PENELITIAN

Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi, dengan harapan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan mengelola keuangan daerahnya dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan.

Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang ada dan informasi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain: Jambi Dalam Angka, Laporan Realisasi PAD.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari pihak eksteren atau sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, lain-lain PAD yang syah, serta pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak atau instansi terkait di Provinsi Jambi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Keuangan dan Asset Daerah, dan Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Jambi, serta instansi-instansi terkait lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan potensi sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang syah.
2. Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menjelaskan potensi penerimaan jenis-jenis pendapatan asli daerah, yakni sebagai berikut:
    1. Tabel Distribusi Frekuensi
       Menjelaskan tentang indeks perubahan dan atau kontribusi variabel penelitian.
    2. Analisis Daya Pajak dan Retribusi Daerah
       Daya pajak daerah dan retribusi daerah adalah rasio antara penerimaan pajak atau retribusi dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak/retribusi di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengar formula :

$$\textit{Daya Pajak/Retribusi} = \frac{\textit{(penerimaan pajak / retribusi)}}{\textit{PDRB}} \textit{ x 100 persen}$$

3. Analisis Efektifitas PAD
   Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu retribusi dengan potensi retribusi itu sendiri, atau dengan formula :

$$\textit{Efektivitas} = \frac{\textit{(penerimaan pajak / retribusi)}}{\textit{Potensi Pajak / Retribusi}} \textit{ x 100 persen}$$

4. Analisis Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah
   Analisis elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB, yaitu dengan formula :

$$\textit{epdrd} = \frac{\textit{(\% penerimaan pajak / retribusi)}}{\textit{\% PDRB}} \textit{ x 100 persen}$$

5. Analisis tingkat kemandirian Daerah

$$TKD = \frac{PAD}{TPT}$$

6. Peta kemampuan Keuangan Daerah

Pemetaan kemampuan keuangan Daerah, menggunakan dua indikator yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah, yang diklasifika- sikan sebagai berikut;

Uraian	$TKtD_i > TKtD$	$TKtD_i < TKtD$
$TKD_i > TKD$	Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi	Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah
$TKD_i < TKD$	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi	Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah.

Keterangan;
TKD_i = Tingkat kemandirian daerah i
$TKtD_i$ = Tingkat ketergantungan daerah i
TKD = rata-rata tingkat kemandirian daerah
TKtD = rata-rata tingkat ketergantungan daerah

7. Tingkat Ketergantungan Daerah
   Tingkat ketergantungan daerah diukur dengan menggunakan rumus:

$$TKtD = \frac{PT}{TPD}$$

Keterangan :
TKtD = Tingkat ketergantungan daerah
PT = Penerimaan transfer
TPD = Total penerimaan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Pajak daerah terhadap APBD

Tabel 1. Rasio Pajak Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	APBD	%
2012	808.258.511.161,00	2.663.565.369.283,42	30,00
2013	841.884.751.200,00	2.876.129.174.140,25	29,00
2014	1.010.560.585.180,50	3.165.055.792.535,44	31,00
2015	1.010.318.979.969,00	3.200.129.406.914,79	31,00
2016	966.519.347.102,57	3.391.011.808.116,95	28,00
	Rata-rata		29,80

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Rasio Retribusi Daerah Terhadap APBD

Tabel 2. Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Retribusi Daerah	APBD	%
2012	13.402.905.831,00	2.663.565.369.283,42	0,50
2013	15.363.758.638,00	2.876.129.174.140,25	0,53
2014	14.587.180.553,00	3.165.055.792.535,44	0,46
2015	19.300.781.734,00	3.200.129.406.914,79	0,60
2016	19.321.610.356,80	3.391.011.808.116,95	0,57
	Rata-rata		0,53

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Rasio PAD terhadap APBD

Tabel 3. Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	APBD	%
2012	986.128.843.066,28	2.663.565.369.283,42	37,02
2013	1.060.640.978.633,25	2.876.129.174.140,25	36,88
2014	1.281.239.472.808,44	3.165.055.792.535,44	40,88
2015	1.242.809.864.499.97	3.200.129.406.914,79	38,84
2016	1.232.784.078.662,95	3.391.011.808.116,95	36,35
	Rata-rata		37,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi

Tabel 4. Rasio tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Dana Transfer	TPD	%	Keterangan
2012	764.625.562,00	2.663.565.369.282,4	28,70	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2013	887.613.852,00	2.876.129.174.140,3	30,86	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2014	997.693.222,00	3.165.055.792.535,4	31,52	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2015	1.067.110.634,00	3.200.129.406.914,8	33,35	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik
2016	1.152.097.330,00	3.391.011.808.117,0	33,98	Ketergantungan Fiskal /Kinerja Keuangan cukup Baik

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2017

Kemandirian Daerah Provinsi Jambi

Tabel 5. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Tahun	PAD	Dana Transfer	%	Keterangan
2012	986.128.843.066,28	764.625.562.000	12,89	Instruktif
2013	1.060.640.978.633.25	887.613.852.000	11,95	Instruktif
2014	1.281.239.472.808.44	997.693.222.000	12,84	Instruktif
2015	1.242.809.864.499.79	1.067.110.634.000	11,64	Instruktif
2016	1.232.784.078.662.29	1.152.097.330.000	10,70	Instruktif
	Rata rata		12,00	Instruktif

Pemetaan Kinerja

Tabel 6. Pemetaan Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Keterangan	Kuadran
PENDAPATAN DAERAH	2
Pendapatan Asli Daerah	2
Pajak Daerah	2
Retribusi Daerah	3
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	4
Lain-lain PAD yang Sah	2
Dana Perimbangan	2
Bagi Hasil Pajak	4
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2
Dana Alokasi Umum	1
Dana Alokasi Khusus	3
Lain-lain Pendapatan yang Sah	1

Sumber: data diolah,2017

Klasifikasi

Tabel 7. Klasifikasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukan dengan besarnya nilai *share* disertai nilai *growth* yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi
III	Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2016

Uraian	TKDi > TKD	$TKtD_i$ < TKtD
TKDi > TKD	Tahun 2012, 2014 Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi	Tahun 2012, 2013, 2014 Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah
TKD_i < TKD	Tahun 2013, 2015, 2016 Wilayah belum mandiri Dan tingkat ketergantungan tinggi	Tahun 2015, 2016 Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah

Sumber: data diolah, 2017

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa temuan pokok, yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan selama periode tahun 2012-20116 secara rata-rata 5,18 % per tahun. dengan kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertambangan penggalian.
2. Pertumbuhan ekonomi utamanya pada sektor jasa, meliputi: perdagangan, hotel, restoran/rumah makan, pengangkutan, komunikasi, listrik, keuangan, persewaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari sektor industri dan pertambangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.

3. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah selama periode tahun 2012-2016 secara rata-rata sebesar 37,99 % per tahun dan untuk tahun 2012 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 37,02 %. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga sangat besar.
4. Secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 kemampuan/daya pajak daerah relatif rendah jika dihubungkan dengan Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan daya retribusi daerah jika dihubungkan dengan Produk Domestik Regional Bruto juga masih relatif rendah, namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan.
5. Secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 103,63 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan pajak daerah. Bigitu pula realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai 103,20 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan retribusi daerah. Sedangkan realisasi penerimaan laba BUMD hanya mencapai 131,01 % per tahun (sangat efektif) dari target penerimaan laba BUMD dan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang syah hanya mencapai 109,36 % per tahun (sangat efektif).
6. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 5,18 % per tahun, maka diharapkan elastisitas pertambahan penerimaan pajak daerah meningkat 8,90 % per tahun. elastisitas pertambahan penerimaan retribusi daerah sebesar 12,91 % per tahun.
7. Rasio Tingkat ketergantungan daerah provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata sebesar 31,69 persen pertahun
8. Rasio kemandirian daerah provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 cera rata-rata 12 persen pertahun dengan kondisi instruktif berarti sangat tergantung dengan pemerintah pusat
9. Pemetaan kinerja pemerintah daerah provinsi Jambi, pendapatan daerah berada pada kuadran 2, PAD juga berada pada kuadran 2, pajak daerah pada kuadran 2, retribusi daerah pada kuadran 3, pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan pada kuadran 4, bagi hasil pajak pada kuadran 4, dana alokasi umum kuadran 1, dana alokasi khusus kuadran 3, lain-lain pendapatan yang sah kuadran 1.
10. Peta kemampuan keuangan daerah provinsi Jambi, Tahun 2012, 2014 Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi, tahun 2013, 2014 wilayah mandiri dengan tingkat keterantungan rendah, tahun 2015, 2015 wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi
11. Tingkat efektifitas realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jambi , secara rata-rata selama periode tahun 2012-2016 mencapai 109,36 % (sangat efektif). Hal ini disebabkan:
12. Kontribusi PAD terhadap APBD provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata pertahun 37,91 persen
13. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 26,87 persen pertahun.
14. Kontribusi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 25,64 persen pertahun
15. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 21,51 persen pertahun
16. Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,01 persen pertahun
17. Kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,32, persen pertahun
18. Kontribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,60 persen pertahun
19. Kontribusi bagian laba bank Jambi terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 1,98 persen pertahun
20. Kontribusi penerimaan jasa giro terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun

waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,25 persen pertahun

21. Kontribusi rekening deposito pada kas daerah terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 1,93 persen pertahun
22. Kontribusi denda keterlambatan kegiatan terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,93 persen pertahun
23. Kontribusi BLUD RSU Raden Mattaher terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 2,59 persen pertahun
24. Kontribusi BLUD RSJ terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,01 persen pertahun
25. Kontribusi penerimaan UPTD AKFAR dan AAK terhadap PAD di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2012 – 2016 secara rata-rata 0,32 persen pertahun
26. Daya pajak daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 rata-rata pertahun sebesar 0,64 persen pertahun
27. Daya retribusi daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 rata-rata pertahun sebesar 0,11 persen pertahun
28. Rata-rata efektifitas pajak daerah provinsi jambi dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016 adalah 103,63 persen sangat efektif
29. Rata-rata efektivitas retribusi daerah selama kurun waktu 2012 – 2016 sebesar 103, 20 sangat efektif.
30. Perkembangan efektifitas laba BUMD rata-rata 131,01 persen pertahun sangat efektif
31. Penerimaan lain-lain PAD yang sah rata-rata pertahun selama kurun waktu 2012 – 2016 153,62 persen sangat efektif.
32. Elastisitas pajak pada tahun 2013 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2014 sebesar 1,74 persen ini menunjukan perubahan PDRB pekah terhadap perobahan pajak. Namun pada tahun 2015 – 2016 perobahan nilai PDRB tidak pekah terhadap perobahan pajak.
33. Elastisitas retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar 1,13 persen ini menunjukkan kepekahan perobahan nilai PDRB terhadap perobahan nilai pajak, pada tahun 2015 kepekahan PDRB terhadap nilai pajak sebesar 45, 50 perse.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1999***, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999***, Sinar Grafika, Jakarta.

Anonim, 2009, ***Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***, Sinar Grafika, Jakarta

Anonim, 2004, Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Anonim, 2009, Undang- undang No 28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa

Aronson, J.R., and Schwartz, E., 1996. ***Management Policies in Local Government Finance.,*** The International City Management Association. Washington D.C

Badan Pusat Statistik, 2012, ***Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2012,*** Penerbit: BPS ***Provinsi Jambi***

Badan Pusat Statistik, 2013, ***Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2013,*** Penerbit: BPS ***Provinsi Jambi***

Badan Pusat Statistik, 2014, ***Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2014,*** Penerbit: BPS ***Provinsi Jambi***

Badan Pusat Statistik, 2015, ***Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2015,*** Penerbit: BPS ***Provinsi Jambi***

Badan Pusat Statistik, 2016, ***Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2016,*** Penerbit: BPS ***Provinsi Jambi***

Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, ***Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah***, Buku I.

Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, ***Himpunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah***, Buku I.

Bagian Hukum Setda Provinsi Jambi, ***Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Retribusi Daerah***, Buku II.